

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setiap organisasi besar maupun kecil, dapat dikatakan bahwa salah satu sumber daya yang penting adalah manusia yang berkedudukan sebagai karyawan, buruh ataupun pekerja. Organisasi merupakan sarana kegiatan orang-orang dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dalam wadah kegiatan ini, setiap orang atau pegawai harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatannya. Setiap pegawai dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik, sehingga daya saing organisasi semakin besar. Sumber daya manusia merupakan unsur yang strategis dalam menentukan baik atau tidaknya suatu organisasi.

Kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan ataupun instansi pemerintahan dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan. Salah satunya pelatihan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Seseorang dengan akuntabilitas tinggi tidak akan melemparkan tanggungjawabnya kepada orang lain. Kepala instansi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang baik pasti akan merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat staffnya. Karena itu aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seuruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya terhadap publik.

Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari APBD akan berjalan lancar apabila penyajian laporan keuangan dilakukan dengan benar dengan memberikan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan keuangan. Peningkatan akuntabilitas keuangan di Indonesia dapat terwujud dengan salah satu cara yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan baik di pusat maupun otonomi daerahnya masing-masing. Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di daerah harus di laksanakan di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota. Pada umumnya permasalahan dalam akuntabilitas keuangan terjadi di beberapa pemerintahan Kabupaten sehingga menyebabkan laporan keuangan kurang berkualitas karena sistem akuntansi yang lemah. Dalam hal ini penulis mengambil contoh pengelolaan keuangan di pemerintahan kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya tingkat akuntabilitas daerah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintah daerah dan Pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Cianjur. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus membuat laporan akuntabilitas kinerja adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan organisasi tersebut perlu adanya perencanaan dalam pelaksanaan program. Karena

perencanaan merupakan bagian dari proses untuk menentukan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun oleh pemerintah merupakan himpunan dari LAKIP Satuan Kerja (Satker) yang berada di lingkungan lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2014 yang melakukan evaluasi terhadap LAKIP Satker pada pemerintah pusat dan daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berada di bawah Inspektorat masing-masing instansi/ lembaga. Sedangkan untuk penilaian terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah sejalan dengan tuntutan reformasi, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan harus lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan.

Akuntabilitas keuangan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah akan menjadi tolak ukur dari keberhasilan pemerintahan yang dijalankan

selama ini. Apabila kinerja SKPD yang berada dilingkungan instansi di Cianjur tidak baik maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Cianjur sendiri. karena anggaran daerah yang tertuang dalam APBD tentu tidak akan memberikan efek yang signifikan kepada masyarakat apabila SKPD sebagai pihak yang mengelola anggaran tidak dapat merealisasikan APBD tersebut secara efektif. Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Cianjur, terdapat masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Program**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Dana Tersedia	%
2013	6.618.197.000,00	6.382.558.386,00	235.638,614	92,87%
2014	8.318.978.394,00	8.098.535.155,00	220.443.239	97,35%
2015	18.379.850.500,00	16.710.880.622,00	1.668.969.878	90,91%
2016	20.584.410.250,00	18.322.567.476,00	2.261.842.774	89%

(Sumber : Lakip Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Cianjur Tahun 2013-2016)

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang realisasi anggaran program dapat dilihat bahwa terdapat prosentase realisasi yang belum tercapai. Dari data 4 tahun terakhir pada tahun 2013 sampai 2016 anggaran program terjadi penurunan. terhadap realisasi anggaran, hal ini diakibatkan adanya beberapa program yang tidak tercapai sehingga mengakibatkan pembangunan sub sektor peternakan perikanan dan kelautan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang semakin berat dan kompleks. Harga komoditas peternakan dan perikanan yang masih tinggi, akibat dari bahan baku pakan masih import, masih menjadi isu strategis pada

tahun 2016 ini. Selain itu, Isu pencemaran lingkungan, pencurian sumberdaya kelautan dan masih tingginya import komoditas peternakan adalah beberapa contoh permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan perikanan dan kelautan saat ini.

. Berikut adalah rincian pencapaian program kegiatan di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan :

**Tabel 1.2**  
**Pencapaian Program Kegiatan**

Program	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
Program Pencegahan dan Penanggungan Penyakit Ternak	2014	200.000.000,00	199.783.569,00	99,89	Tercapai
	2015	249.150.000,00	248.960.000,00	99,92	Tercapai
	2016	2.911.361.250,00	1.625.167.050,00	55,83	Tidak Tercapai
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2014	2.495.550.000,00	2.363.895.791,00	94,72	Tercapai
	2015	10.634.442.500,00	8.228.149.654,00	77,37	Tidak Tercapai
	2016	4.678.822.500,00	3.385.741.800,00	72,36	Tidak Tercapai
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Argibisnis Pertenakan	2015	3.159.545.000,00	2.892.790.000,00	91,56	Tidak Tercapai
	2016	1.857.379.000,00	1.690.999.000,00	91,04	Tidak Tercapai

(Sumber : LAKIP Dinas Kelautan Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Cianjur 2014-2016)

Dilihat pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat masalah yang berhubungan dengan prosentase jumlah tercapainya program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak sebesar 55,83% dengan kategori sangat kurang.

Sedangkan program pengembangan budidaya perikanan dalam kategori kurang sebesar 72,36% dari capaian anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini akibat adanya fungsi lahan sawah dan lahan darat menjadi kawasan industri dan pemukiman dalam beberapa tahun ini menyebabkan berkurangnya areal budidaya perikanan khususnya untuk minapadi dan kolam air tenang, sehingga berimbas pada penurunan tingkat produksi perikanan budidaya khususnya yang berasal dari areal tersebut.

Selisih capaian anggaran yang masih kurang dari 100 % adanya kelemahan, karena menurut Halim(2014:155) bahwa jika terjadi selisih kurang maka sangat mungkin terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanja kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak terlaksana padahal sudah diamanatkan dalam anggaran.

**Tabel 1.3**  
**Standar Akuntabilitas Kinerja Pegawai**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

No	Capaian Akuntabilitas Kinerja Pegawai	Keterangan
1.	Nilai 93 s/d 100	BAIK
2.	Nilai <93	Kurang

(Sumber: LAKIP Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Cianjur Tahun 2016)

Salah satu cara untuk mengukur capaian akuntabilitas kinerja pegawai dapat dilihat dari tabel 1.3 menggunakan standar akuntabilitas kinerja pegawai. Berdasarkan tolak ukur dari standar akuntabilitas bahwa ada beberapa program

yang tidak tercapai diantaranya program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program pengembangan budidaya perikanan dan program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan. Hal ini diakibatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masih belum dilaksanakan dengan baik, karena pada pencapaian program kegiatan masih ada yang dibawah standar akuntabilitas kinerja pegawai.

Pentingnya akuntabilitas anggaran yang bekerja dibidang keuangan, haruslah selalu ditingkatkan, karena berbicara masalah pengelolaan keuangan, sangatlah sensitif. Pegawai-pegawai yang bekerja dibidang pengelolaan keuangan haruslah pegawai yang kompeten dibidangnya, juga harus sering mendapatkan pelatihan dan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi telah meningkatkan peran dan tanggungjawab pemerintah dalam mengelola dan membantu kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah adalah Pengelolaan Keuangan daerah (Halim: 2009). Pengelolaan Keuangan daerah menurut PP No. 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Aspek pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pemendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah sebagai implementasi dari ketentuan pasal 308 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah .

Proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah diatur dalam UU No 1 Tahun 2004

pembendaharaan dan UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Kedua paket UU tersebut merupakan produk legislasi sebagai wujud untuk melaksanakan reformasi dibidang keuangan negara.

Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaan dana.

Sebuah instansi atau lembaga yang berorientasi kepada masyarakat dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang mengandung transparansi dan akuntabilitas. Seperti fenomena yang ditemukan pada akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah. Bahwa ada sekitar enam OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang realisasi DAKnya (Dana Alokasi Khusus) masih sangat rendah. Jika bantuan dana itu tidak terserap hingga akhir tahun anggaran, maka akan menjadi beban anggaran pemkab Cianjur. (Sumber : [www.inilah.com](http://www.inilah.com)).

Masalah pengelolaan keuangan menjadi paling banyak dicari oleh media, karena pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan



keuangan negara. Pengelolaan keuangan yang dapat mengoptimalkan anggaran merupakan pengelolaan yang baik bagi pembangunan daerah. Kepala SKPD selaku penggunaan anggaran / penggunaan barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan meliputi :

- a. Laporan Relaisasi Anggaran.
- b. Neraca.
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- d. Laporan dimaksud disusun sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada Dinas Pertenakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur, peneliti mendapatkan data mengenai permasalahan pengelolaan keuangan sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Laporan Realisasi Anggaran 2014-2016**  
**Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertenakan**  
**Kabupaten Cianjur**

TAHUN	TARGET	REALISASI	DANA TERSEDIA	%	Max	Min	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2013	Rp 6.618.197.000.00	Rp 6.382. 558.386.00	(Rp. 235.638,614)	96,44%	100%	93%	Tercapai
2014	Rp 15.205.510.891.00	Rp 14.868.549.483.00	(Rp. 336.961.408)	97,78%	100%	93%	Tercapai
2015	Rp 17.984.149.265,50	Rp 17.307.526.888.00	(Rp. 676.622.377.50)	96,23%	100%	93%	Tercapai
2016	Rp 22.069.596.124.25	Rp 19.213.784.692.00	(Rp.2.885.811.432.25)	87,06%	100%	93%	Tidak Tercapai

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan Perikanan Pertenakan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 )

Dilihat dari tabel 1.4. bahwa realisasi anggaran di dinas perternakan perikanan dan kelautan kabupaten cianjur belum mencapai target. Dilihat dari data 4 tahun terakhir pada tahun 2016 realisasi anggaran belum mencapai yang dicapai berkisar 87,06% berada dalam kategori rendah dari batas minimal anggaran yang ditetapkan . Hal ini diakibatkan harga komoditas peternakan dan perikanan yang masih tinggi, akibat dari bahan baku pakan masih import, masih menjadi isu strategis pada tahun 2016 ini. Selain itu, Isu pencemaran lingkungan, pencurian sumberdaya kelautan dan masih tingginya import komoditas peternakan adalah beberapa contoh permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan perikanan dan kelautan saat ini.

Peneliti menemukan masalah utama dari data Laporan Akuntabilitas Pegawai dan Laporan realisasi anggaran yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan sehingga dalam menyusun laporan keuangan masih adanya dana serap kurang dari 100% dan belum terlaksananya pembekalan dalam perencanaan program sehingga masih adanya dana sisa anggaran. Selain itu

pengguna anggaran dan Bendahara kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya *copy paste* dari kegiatanyang lalu

Berdasarkan data-data yang diperoleh,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN CIANJUR”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan yang rendah, terbukti dari pegawai pengelolaan keuangan yang masih kurang mampu menyerap anggaran hingga 100%. Hal ini akibat kurang adanya pembekalan dalam perencanaan anggaran program kegiatan
2. Akuntabilitas kinerja pada tahun 2016 dilihat dari target program pengembangan budidaya perikanan dalam kategori kurang sebesar 72,36% dari capaian anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini akibat adanya fungsi lahan sawah dan lahan darat menjadi kawasan industri dan pemukiman dalam beberapa tahun ini menyebabkan berkurangnya areal budidaya perikanan khususnya untuk minapadi dan kolam air tenang. Hal ini berimbas pada penurunan tingkat produksi perikanan budidaya khususnya yang berasal dari areal tersebut.

3. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan masih belum dilaksanakan dengan baik dilihat dari program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak sebesar 55,83% dengan kategori sangat kurang. Karena pada optimalisasi UPTD bidang perternakan dan kesehatan hewan terjadi kendala dalam pencairan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pihak ketiga.
4. Pengguna anggaran dan Bendahara kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya *copy paste* dari kegiatan yang lalu.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh perencanaan dan penganggaran terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan ?
2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan dan penatausahaan terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan ?
3. Seberapa besar pengaruh pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan?
4. Seberapa besar pengaruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Cianjur ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan dan penganggaran terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan dan penatausahaan terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Cianjur.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan akuntabilitas pegawai.
  - b. Dapat menjadi masukan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Cianjur khususnya mengenai masalah pengelolaan keuangan.

- c. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa administrasi publik khususnya pengelolaan keuangan daerah dalam akuntabilitas pejabat pengelola keuangan.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pengelolaan keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas pegawai di instansi pemerintah, dan rekomendasi yang berguna bagi instansi dalam melaksanakan Peraturan Menteri No 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terutama pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertenakan Kabupaten Cianjur.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan daerah menurut Yani (2013: 348) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Definisi tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang penting dalam melaksanakan penyusunan anggaran.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah suatu usaha-usaha yang mengatur segala hal tentang pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Yani (2013: 349-357 ), dimensi yang mempengaruhi pengelolaan keuangan adalah :

1. Perencanaan dan Penganggaran
2. Pelaksanaan dan penatausahaan
3. Pertanggungjawaban

Proses pengelolaan keuangan memiliki tiga faktor yang harus terpenuhi. pengelolaan keuangan sangat penting karena pengelolaan merupakan perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam penyusunan anggaran. Tanpa adanya pengelolaan yang baik pelaporan keuangan tidak akan sesuai dengan acuan yang telah ada, maka diperlukan struktur pembiayaan yang efisien guna mencapai hasil yang maksimal.

Proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah diatur dalam UU No 1 Tahun 2004 pembendaharaan dan UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Kedua paket UU tersebut merupakan produk legislasi sebagai wujud untuk melaksanakan reformasi dibidang keuangan negara. Sebuah instansi atau lembaga yang berorientasi kepada masyarakat dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang mengandung transparansi dan akuntabilitas.

Berkaitan dengan usaha akuntabilitas, Mariasmo (2009:20) memberikan definisi mengenai akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas yaitu sebagai kewajiban amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan menyajikan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memerikan hak dan kewenangan untuk meminta

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah sejalan dengan tuntutan reformasi, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan harus lebih transparan dan akuntabel. Sedangkan, pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Mardiasmo (2009:2), akuntabilitas pemerintahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

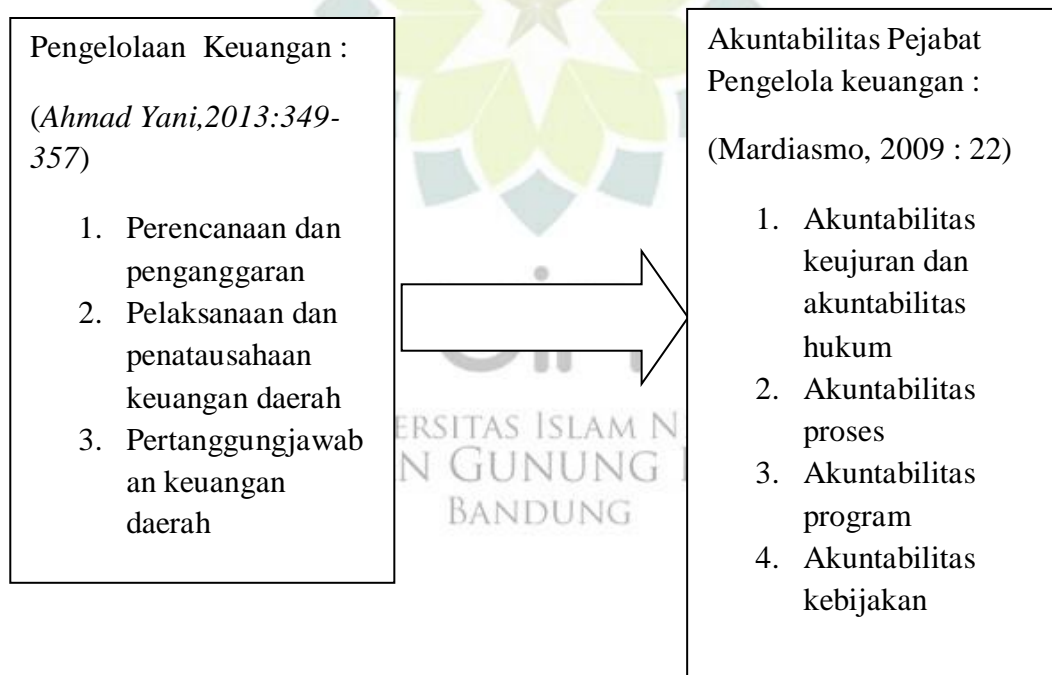
Pada intinya akuntabilitas dapat terpenuhi jika masing-masing dimensi dari akuntabilitas dapat terpenuhi. Beberapa pihak bertanggungjawab dalam akuntabilitas. salah satunya pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh pejabat instansi. Karena dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan *budgeting*



*reform* yang meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan akuntabilitas anggaran.

Pengelolaan Keuangan merupakan variabel bebas yang membentuk Akuntabilitas sebagai variabel terikat. Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis menggambarkan model kerangka penelitian yang lebih rinci, sebagai berikut

**Gambar 1.1**  
**Model kerangka pemikiran**



## 1.7 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:70) mengatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.” Bentuk hipotesis yang akan penulis ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono(2011:77).Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menggunakan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- 1 Ha: Terdapat pengaruh perencanaan dan penganggaran terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan .  
Ho: Tidak terdapat pengaruh perencanaan dan penganggaran terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan.
- 2 Ha: Terdapat pengaruh pelaksanaan dan penatausahaan terhadap Akuntabilitas pejabat pengelola keangan.  
Ho: Tidak terdapat pelaksanaan dan penatausahaan terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan.
- 3 Ha: Terdapat pengaruh pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan .

Ho: Tidak terdapat pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan.

4 Ha: Terdapat pengaruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan.

Ho: Tidak terdapat pengaruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas pejabat pengelola keuangan.

